# OMBUDSMAN MALUKU UTARA OTW JEMPUT ADUAN WARGA

**Jum'at, 16 Mei 2025 - malut**

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara melakukan program "Ombudsman Temu Warga (OTW)" dengan metode PVL On the Spot (OTS) secara door to door di Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate.

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) sebagai upaya proaktif menjaring informasi dan laporan terkait pelayanan publik langsung dari masyarakat.

Mengusung metode baru, PVL OTS dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk menggali lebih dalam permasalahan yang mereka alami. Dengan pendekatan ini, tim berharap dapat menjangkau lebih banyak laporan sekaligus memahami secara langsung kendala yang dihadapi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

Kegiatan ini diawali dengan koordinasi bersama Lurah Foramadiahi, pada Rabu, 14 Mei 2025, guna memastikan keakuratan data warga yang akan dikunjungi. Selanjutnya, pelaksanaan PVL OTS dilakukan selama dua hari, yaitu 15 hingga 16 Mei 2025.

Pada hari pertama, tim PVL menyambangi rumah-rumah warga yang telah dipetakan sebelumnya untuk mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik seperti bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan bagi anak stunting, serta anak dengan gizi buruk.

Sedangkan di hari kedua, tim membuka posko layanan di Kantor Lurah Foramadiahi dan menerima warga yang ingin menyampaikan aduan atau berkonsultasi terkait pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Maluku Utara, Iriyani Abd. Kadir, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk mendekatkan layanan Ombudsman kepada masyarakat serta meningkatkan pemahaman warga tentang hak-hak mereka terhadap pelayanan publik.

"Dengan kegiatan PVL OTS ini, kami ingin mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan konsultasi dan pengaduan. Selain itu, ini menjadi sarana edukasi tentang peran dan fungsi Ombudsman, serta mendorong masyarakat agar lebih sadar akan hak-haknya dalam penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya.

Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah awal memperluas jangkauan pengawasan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang masih minim akses informasi dan laporan masyarakat.